

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk kemajuan suatu bangsa. Hal ini karena perkembangan manusia dari mulai lahir hingga mati sangat dipengaruhi oleh proses belajar semasa hidupnya. Terwujudnya sebuah masyarakat modern juga berkat penemuan-penemuan baru di dalam dunia ilmu pengetahuan. Dengan demikian, manusia menempuh proses pendidikan bertujuan supaya hidupnya jauh lebih baik dan sejahtera.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Permendiknas No.70 tahun 2009 pasal 1, menyatakan pendidikan inklusif didefinisikan sebagai system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama sama dengan peserta didik pada umumnya.²

Program pendidikan inklusi tidak hanya diterapkan pada anak yang memiliki kebutuhan khusus tetapi untuk semua anak karena pada dasarnya setiap anak memiliki karakteristik, keunikan, dan keberagaman secara alamiah sudah ada pada diri anak. Karakteristik setiap anak ini yang harus

¹ Abdillah Hidayat, Rahmat, *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori Dan Aplikasinya* (Medan: LPPPI, 2019).

² Irdamurni, *Pendidikan Inklusif Solusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

difasilitasi dalam semua jenjang pendidikan pada umumnya dan pendidikan anak usia dini pada khususnya.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu baik yang mengalami kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, memiliki bakat istimewa, dan yang tinggal di daerah terpencil. Undang-undang tentang sistem pendidikan ini menjelaskan bahwa pendidikan inkusi tidak hanya untuk anak-anak yang mengalami kebutuhan secara fisik tetapi juga untuk anak-anak yang mempunyai kebudayaan, sosial, geografi dan bahasa yang berbeda untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama sesuai kebutuhan setiap anak sehingga dapat menstimulai perkembangan, pengetahuan dan keterampilan anak.³

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia sudah memiliki landasan yang kuat, pertama landasan religius, sebagai bangsa yang beragama dan mayoritas penduduk Negara Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan agama. Allah Swt, menyatakan dalam Al-Quran bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang satu sama lainnya berbeda. Allah Swt, menciptakan manusia berbeda satu sama lain dengan maksud agar dapat saling berinteraksi dalam rangka saling tolong-menolong, dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَايِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ

³ Syaiful Bahri, 'Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar', *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4.1 (2021), 94–100.

“Wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal” (QS. Al-Hujurat, 49:13)

Kedua landasan filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang dibangun atas dasar bhineka tunggal ika. Bertolak pada falsafah tersebut, bahwa kelainan fisik dan psikis hanyalah salah satu bentuk perbedaan untuk disatukan dalam sebuah sistem pendidikan agar terjadinya interaksi serta sikap saling toleransi. Pendidikan tersebut juga merupakan hak bagi semua orang yang artinya pendidikan dilaksanakan tidak memandang perbedaan orang baik itu dari sudut pandang agama, ras, suku, fisik maupun bangsa. Dari perihal fisik ini, pada kenyataannya tidak semua orang mampu memperoleh pendidikan dengan baik. Hal inilah yang dialami oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Ketiga landasan yuridis, landasan yuridis internasional yaitu deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Pasal 26 ayat (1) setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (2) yang tertulis bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 34, bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan yang

sama dengan anak-anak normal dalam pendidikan. Selama ini, tidak sedikit kalangan masyarakat yang belum menerima secara positif kehadiran anak berkebutuhan khusus tersebut. Sebagian dari mereka masih memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus.

Dalam penyelenggara pendidikan perlu adanya komponen kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar perlu adanya manajemen yang baik terkait kurikulum. Manajemen kurikulum, yaitu terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Lebih lanjut Rusman, mengemukakan bahwa manajemen kurikulum adalah sebagai usaha sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum⁴. Manajemen kurikulum sangat diperlukan dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan inklusif. Hal tersebut, sangat membantu lembaga pendidikan inklusif dalam merumuskan perencanaan, proses pelaksanaan, dan evaluasi dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang sekolah dasar inklusif dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah perpedoman pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

⁴ Rusman. Manajemen Kurikulum. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2012)

Fakta yang terjadi di lapangan sampai saat ini, terdapat beberapa kelompok penyandang disabilitas atau kecacatan yang kurang mendapat perhatian

Dari masalah yang ditemukan setelah melakukan pra observasi⁵ dan wawancara dengan guru di SDN Panancangan 1 Kota Serang minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusif seperti media pembelajaran, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusif, karena belum ada guru yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa. Hal ini, menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusif belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Sehingga sepertinya program pendidikan inklusif hanya terkesan program percobaan saja. Kondisi semacam ini jelas menambah beban tugas yang harus diemban para guru yang berhadapan langsung dengan persoalan teknis di lapangan. Di satu sisi para guru harus berjuang keras memenuhi tuntutan hati nuraninya untuk mencerdaskan seluruh siswanya, sementara di sisi lain para guru tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Guru SDN Panancangan 1 Kota Serang cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan kurikulum yang fleksibel. Tidak adanya guru pendamping khusus, yang ada hanya guru kelas. Kurang perhatian dan peran serta orang tua dan pemerintah terhadap siswa inklusi serta manajemen kurikulum di SDN Panancangan belum menerapkan kurikulum yang sesuai dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Program pembelajaran individual yang belum terprogram, sehingga mengakibatkan kompetensi anak berkebutuhan khusus tidak terukap dan belum mampu dikembangkan secara optimal. Rendahnya kinerja guru inklusif, karena hanya mendapatkan sosialisasi saja tidak ada pelatihan- pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi kinerja guru.

⁵ Hasil pra observasi, tanggal 22 November 2022

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk permasalahan serta bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti memberikan identifikasi masalahnya yaitu:

1. Kurang perhatian dan peran serta orang tua dan pemerintah terhadap siswa inklusi
2. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Panancangan 1 Kota Serang belum maksimal
3. Tidak adanya guru pendamping khusus di SDN Panancangan 1 Kota Serang
4. Kurangnya kompetensi guru SDN Panancangan 1 Kota Serang dalam menangani anak berkebutuhan khusus di kelas regular.
5. Guru SDN Panancangan 1 Kota Serang cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan kurikulum yang fleksibel.
6. Manajemen Kurikulum di SDN Panancangan 1 belum menerapkan kurikulum yang sesuai dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
7. kurangnya pelatihan peningkatan guru SDN panancangan 1 Kota Serang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan idetifikasi masalah yang telah penulis uraikan, ternyata banyak aspek-aspek yang mempengaruhi manajemen kurikulum di sekolah dasar dalam pengembangan pendidikan inklusif. Aspek-aspek tersebut antara lain, yaitu kompetensi guru dalam penanganan anak berkebutuhan khusus, sekolah cendrung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan kurikulum yang fleksibel.

manajemen kurikulum nya belum sesuai dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Oleh karena itu, agar penelitian ini lebih fokus, maka penulis membatasi penelitian ini, pada masalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum di SDN Panancangan 1 Kota Serang dalam pengembangan pendidikan inklusif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perencanaan kurikulum bagi ABK di SDN Panancangan 1 Kota Serang ?
2. Bagaimana pelaksanaan kurikulum bagi ABK di SDN Panancangan 1 Kota Serang
3. Bagaimana evaluasi kurikulum bagi ABK di SDN Panancangan 1 Kota Serang ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari uraian diatas maka jawaban atau tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika manajemen program pendidikan inklusif di SDN Panancangan 1 Kota Serang yaitu :

1. Untuk mengetahui perencanaan kurikulum bagi ABK di SDN Panancangan 1 Kota Serang
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kurikulum bagi ABK di SDN Panancangan 1 Kota Serang
3. untuk mengetahui evaluasi kurikulum bagi ABK di SDN Panancangan 1 Kota Serang

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memperoleh teori/konsep praktis tentang manajemen kurikulum pendidikan inklusif

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk sumber pembinaan kepala sekolah maupun guru dan lingkungan agar tercipta manajemen kurikulum pendidikan inklusif yang tepat.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah daerah untuk menentukan kurikulum pendidikan inklusif di sekolah dasar di daerah pimpinannya.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk menerapkan atau mengembangkan teori melalui penelitian-penelitian tentang manajemen kurikulum pendidikan inklusif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini peneliti akan jelaskan garis besar isi dari keseluruhan skripsi dalam bentuk sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan tersebut antara lain adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini meliputi konsep belajar, pembelajaran matematika, kesulitan belajar, kesulitan belajar matematika, faktor kesulitan belajar dan kajian peneliian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Meliputi Pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi peneliti, Data dan Sumber data, Teknik pengumpulan data, Instrumen Pengumpulan data, Analisis data, Prosedur penelitian dan pengecekan keabsahan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini melputi deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian, Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini meliputi simpulan dan saran